

**MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT  
PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)  
DI KELURAHAN SICINCIN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR  
KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Oleh: Sembu Novela**

**Email: [sembu.novela3140@student.unri.ac.id](mailto:sembu.novela3140@student.unri.ac.id)**

**Dosen Pembimbing: Nurhamlin**

**Email: [nurhamlin@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurhamlin@lecturer.unri.ac.id)**

Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru,  
Pekanbaru Riau. 28293. Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Penetapan masyarakat penerima BPNT dilakukan oleh Kementerian Sosial RI. Penetapan tersebut sesuai dari hasil pendataan yang dilakukan dilapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penetapan masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang/pendukung dalam menetapkan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert King Merton yaitu mengenai fungsi nyata (manifest) dan fungsi tersembunyi (laten). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini berjumlah sebanyak 4 orang yang terdiri dari Kepala Kelurahan, Kasi Kesos dan Ekbang, Ketua RT 002, dan Ketua PSM sekaligus Tim Verval. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penetapan penerima BPNT diawali dari pendataan Kepada Keluarga (KK) miskin, lalu mensurvei prioritas Kepala Keluarga (KK) penerima BPNT dan selanjutnya penetapan penerima BPNT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

**Kata Kunci: Bantuan, Miskin, Penerima BPNT**

**MECHANISM OF DETERMINATION OF COMMUNITY  
RECIPIENTS OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT)  
IN SICINCIN KELURAHAN EAST PAYAKUMBUH DISTRICT  
PAYAKUMBUH CITY WEST SUMATRA PROVINCE**

**By: Sembil Novela**

**Email: [sembil.novela3140@student.unri.ac.id](mailto:sembil.novela3140@student.unri.ac.id)**

**Supervisor: Nurhamlin**

**Email: [nurhamlin@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurhamlin@lecturer.unri.ac.id)**

*Department of Sociology,  
Faculty of Social and Political Sciences,  
Universitas Riau  
Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru  
Pekanbaru Riau. 28293. Tel/Fax. 0761-63277*

**ABSTRACT**

*The determination of BPNT recipient communities is carried out by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The determination is in accordance with the results of data collection carried out in the field. The purpose of this study was to determine and explain the mechanism for determining the recipients of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Sicincin Village, Payakumbuh Timur District and to determine the inhibiting factors and supporting/supporting factors in determining the recipients of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sicincin Village, Sub-District. East Payakumbuh. The theory used in this study is the theory of structural functionalism proposed by Robert King Merton, which is about the real (manifest) and hidden (latent) functions. This type of research uses descriptive qualitative research methods. The subjects of this study amounted to 4 people consisting of the Head of the Village, Head of Kesos and Ekbang, Head of RT 002, and Chair of PSM as well as the Verval Team. Sources of data used are primary data sources and secondary data. Data collected by data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used in this study in the form of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study are the mechanism for determining BPNT recipients starting with data collection for poor families (KK), then surveying the priorities of the Head of Family (KK) recipients of BPNT and then determining BPNT recipients carried out by the Ministry of Social Affairs.*

**Keywords: Aid, Poor, BPNT Recipient**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yaitu pemerintah, yang berkaitan dengan tindakan untuk mengatasi masalah sosial yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial maupun bantuan sosial (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Kesejahteraan atau sejahtera menjadi sesuatu yang dicita-citakan oleh sebuah negara. Masyarakat yang sejahtera merupakan salah satu syarat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi itu sendiri tidak hanya melihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan perbaikan ekonomi, tetapi juga pada masalah sosial yang tengah dihadapi oleh negara tersebut seperti kemiskinan, pengangguran, kematian, kenakalan remaja, kriminalitas, konflik sara, kekerasan seksual dan lain sebagainya.

Penyelesaian masalah kemiskinan dapat dilakukan melalui upaya, artinya kemauan dari keluarga miskin tersebut. Pada umumnya terdapat dua hal yang menjadi pendorong, yaitu pertama, kekuatan internal (keluarga itu sendiri) dan kebutuhan akan partisipasi. Kedua, kekuatan eksternal adalah kekuatan berada di luar dirinya. Kekuatan internal mengacu pada apa yang dapat dimiliki seorang anggota. Kekuatan yang datang dari luar berkaitan dengan bantuan atau usaha untuk mendorong mereka menjadi lebih termotivasi, seperti bantuan keuangan (amal/charity), bantuan peralatan dan usaha. Bentuk bantuan atau usaha tersebut yang telah dilaksanakan selama ini, baik oleh pihak yang berwenang, pihak swasta ataupun pihak lainnya (Hamid, 2018).

Pasal 34 ayat (1) menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara dan meruoka kewajiban pemerintah. Lalu pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menerangkan negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (Utama, 2008). Terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tentang salah satu tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam program untuk menanggulangi masalah kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Yustisia, 2014).

Tentang penyaluran bansos secara non tunai sesuai Perpres 63 Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, muncul peraturan menteri yaitu Permensos No. 11 Tahun 2018 tentang bantuan pangan nontunai. Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah untuk membantu meningkatkan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, pemberian gizi seimbang (KPM) kepada keluarga penerima manfaat, ketepatan sasaran dan beban biaya pada keluarga penerima manfaat.

Terhitung sejak awal tahun 2022 penyaluran program Bansos BPNT disalurkan secara tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui kantor Pos Indonesia. Alasan tersebut karena Presiden meminta agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan cepat. Alasan lain karena dalam praktik penyalurannya kerap ditemui praktik penyimpangan. Mulai barang tidak layak, *e-warong* fiktif, hingga nominal tidak sampai Rp. 110.000. Oleh karena itu, Kemensos Tri Rismaharani mengubah pola penyaluran, Perubahan itu tertuang dalam surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin, tertanggal 18 Februari 2022, nomor 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT. Besar uang yang diterima adalah Rp. 200.000 setiap bulannya. Pencairan

dilakukan sekali 3 bulan dengan besar bantuan Rp. 600.000. Dikutip dari *kompas.com*.

Tabel 1.1  
Perkembangan Penduduk Miskin di Kelurahan Sicincin 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Penerima BPNT	Perubahan
1.	2018	919	136	62	-
2.	2019	924	149	84	22
3.	2020	927	144	84	-
4.	2021	933	133	80	4
5.	2022	931	128	76	4

Sumber: Kantor Kelurahan Sicincin 2022

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa terjadi perubahan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan juga penerima BPNT. Terjadi perubahan yang cukup signifikan dari tahun 2018-2019 yaitu ada kenaikan jumlah penerima BPNT sebanyak 22 KK. Perubahan tersebut terjadi karena dampak Covid-19 yang terjadi di tahun 2019. Jumlah penerima BPNT dari tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan/tetap. Selanjutnya penerima BPNT dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan, begitupun yang terjadi di tahun 2022 ini. Penerima BPNT di tahun 2022 adalah sebanyak 76 KK. Jumlah penerima bantuan program BPNT didapat langsung dari pusat yang berdasarkan dari pendataan yang dilakukan dilapangan. Keluarga yang mendapatkan bantuan akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang mana kartu tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan merupakan penerima

bantuan. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) wajib dibawa dalam pengambilan bantuan tunai ini.

Menurut pemantauan dilapangan, ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan antara lain. Pertama, nama sudah terdaftar dari pusat namun pada saat pembagian bantuan nama tidak ada. Kedua, kesalahpahaman masyarakat yang berpatokan pada nama bagi yang mendapat bantuan sedangkan pemerintah berpatokan pada NIK masyarakat. Contohnya ada dua nama masyarakat yang hampir sama yaitu Erlinda dan Herlinda. Lalu salah satu dari mereka menganggap berhak mendapat bantuan, namun saat pembagian bantuan nama yang keluar adalah Erlinda karena pemerintah berpatokan pada NIK. Hal itu membuat nama yang tidak keluar protes. Ketiga, disebabkan kesalahan data jumlah keluarga pra sejahtera yang tidak cepat diperbaharui. Misalnya ada masyarakat penerima bantuan yang meninggal dunia namun namanya belum dikeluarkan dari penerima bantuan dan juga KPM tersebut telah mampu. Fenomena tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam segi ekonomi bagi mereka yang membutuhkan serta menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Padahal tujuan program BPNT untuk membantu masyarakat untuk hidup dengan layak.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik dan ingin membahas secara mendalam, dimana judul penelitian ini adalah "Mekanisme Penetapan Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat". Penelitian ini menjelaskan secara mendalam bagaimana mekanisme penetapan penerima BPNT di kelurahan tersebut serta menjelaskan faktor penghambat serta faktor penunjang/pendukung dalam menetapkan penerima BPNT.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja faktor penghambat dan penunjang/pendukung dalam menetapkan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penetapan masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang/pendukung dalam menetapkan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui keadaan sebenarnya mengenai mekanisme penetapan warga masyarakat penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur. Dan

hasilnya memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis  
Dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya pada kajian sosiologi pembangunan.
- b. Manfaat Praktis
  1. Sebagai bahan masukan bagi praktisi pemberdayaan masyarakat
  2. Menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat umumnya tentang penetapan penerima Program BPNT tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Struktural Fungsional

Robert King Merton menjelaskan bahwa analisis organisasi berfokus pada organisasi, kelompok, masyarakat dan budaya. Merton mengatakan bahwa apa pun yang dapat digunakan untuk analisis organisasi akan menunjukkan apa yang standar di sini, yaitu apa yang ditetapkan dan diulang. Merton percaya bahwa analisis alur kerja mencakup pekerjaan sosial, struktur organisasi, struktur sosial, struktur budaya, struktur budaya-emosional, struktur sosial, organisasi, struktur sosial, alat kontrol manusia, dan banyak lagi (Ritzer, 2012).

Ada dua konsep yang dipaparkan Merton ialah konsep fungsi nyata (manifes) dan fungsi tersembunyi (laten).

1. Fungsi nyata (manifest) adalah fitur yang digunakan sebagai tujuan yang diharapkan dan diinginkan dalam struktur komunitas. Menurut Merton, kehidupan sosial suatu masyarakat memiliki fungsi yang jelas terkandung dalam tujuan yang diakui dan dicatat dari suatu lembaga. Fungsi manifes juga dikenal sebagai fungsi aktual yang direncanakan dalam fungsi dan dirancang sebagai tambahan pada sistem.

2. Fungsi tersembunyi (laten) adalah fungsi yang tidak diharapkan, dan biasanya karya ini luput dari pandangan publik. Menurut pernyataan Merton dalam (Hunt, Chester L, Ram, & Sinaga, 1984) Sebuah tugas terselubung dijelaskan seperti konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan. Fungsi tersembunyi yang digambarkan oleh Merton tidak selalu membawa sesuatu yang negatif atau berlawanan dengan karya yang terlihat.

## 2. Konsep Implementasi

Dalam kamus bahasa Inggris, *implement* (implementasi) berarti alat atau perlengkapan. Implementasi sendiri dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti aplikasi.

Berikut pengertian implementasi (Subarsono, 2009):

1. Sudarsono menjelaskan bahwa implementasi adalah kegiatan melakukan sesuatu dengan menggunakan (alat) untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Solichin menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Model implementasi oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Riant Nugroho, 2003: 170-174) sering disebut dengan pendekatan top-down. Hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/lembaga pelaksana tidak menimbulkan gangguan/hambatan yang berarti. Terkadang beberapa hambatan/hambatan implementasi kebijakan berada di luar kendali pejabat karena hambatan tersebut bukan merupakan tanggung jawab

pembuat kebijakan. Hambatan ini dapat berupa fisik atau politik.

2. Waktu dan sumber daya yang cukup tersedia untuk menjalankan program.
3. Kombinasi sumber daya yang diperlukan sudah cukup. Satu set sumber daya harus disediakan pada setiap tahap proses penyebaran. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan program yang memerlukan kombinasi modal kerja dan peralatan untuk pelaksanaan program harus dipersiapkan secara bersamaan.
4. Kebijakan yang akan ditempuh didasarkan pada hubungan sebab akibat yang masuk akal.
5. Kausalitas bersifat langsung, dengan hanya sedikit mata rantai.
6. Dependency harus kecil, apabila terdapat interaksi ketergantungan menggunakan setting lain wajib kecil.
7. Pemahaman dan kesepakatan yang mendalam tentang tujuan.
8. Tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi penuh antara komponen atau badan yang berpartisipasi dalam program.
10. Mereka yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan penuh.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi ini merupakan suatu prosedur atau prosedur yang layak dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dalam studi ini, implementasinya berupa pendataan masyarakat miskin untuk mengidentifikasi penerima BPNT. Proses pelaksanaannya berdasarkan peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penggunaan konsep implementasi sangat sesuai dengan masalah penelitian yang diajukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep implementasi dalam penelitian ini.

### **3. Konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) adalah bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tunai setiap bulan sebesar Rp. Dengan 200.000 kantor pos. Kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kartu debit atas nama pengelola keluarga, Dompot yang wajib dibawa KPM saat menggunakan bantuan (BPNT, 2019).

Keberhasilan program BPNT tercermin dari tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil, diperlukan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan sesuai prosedur aturan yang berlaku.

### **4. Tujuan program BPNT**

Tujuan Program BPNT sebagai berikut (Fadlurrohimi, Nulhaqim, Sulastri, 2019) :

- 1) Untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama pangan.
- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang.
- 3) Memberikan ketepatan dalam sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 4) Memberikan pilihan dan kendala kepada KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
- 5) Memberi dorongan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).
- 6) Mendorong usaha eceran rakyat.

### **5. Mekanisme Penetapan BPNT (SOP)**

Mekanisme penetapan penerima BPNT adalah seluruh proses dalam pemberian bantuan yang berdasarkan pada SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial RI. Berikut

mekanisme penetapan BPNT (BPNT,2019) :

1. Penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional oleh Kementerian Sosial RI setiap tahun.
2. Target KPM yang diberikan bantuan BPNT sesuai dengan alokasi KPM yang telah ditentukan menteri sebelumnya.
3. Penetapan jumlah KPM nasional dan setiap kota berdasarkan kepada Direktur Jenderal Fakir Miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Berdasarkan jumlah KPM secara nasional dan secara kota, daftar calon KPM disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data D T K S , satuan kerja tersebut menyampaikan kepada Dinas Sosial Kota melalui sistem informasi kesejahteraan sosial. Selanjutnya Dinas Sosial menyampaikan ke Tim Verval (Verifikasi dan Validasi) kelurahan.
5. Pembuatan rekening Daftar calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperiksa dan dilengkapi dengan variabel oleh dinas sosial daerah kota.
6. Variabel-variabel yang dimaksud berdasarkan point ke-5 adalah :
  - a. Nama dari calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
  - b. Nomor induk kependudukan dan kartu keluarga dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah sepadan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Tempat lahir dari pemegang Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

- d. Tanggal lahir dari KPM.
  - e. Nama gadis ibu kandung daripemegang KPM.
  - f. Nama kepala keluarga KPM.
  - g. Nama anggota keluarga KPM.
  - h. Tempat tinggal KPM berdasarkan kartu tanda penduduk.
  - i. Kode wilayah daerah provinsi, kota, kecamatan, kelurahan berdasarkan kartu tanda penduduk KPM program BPNT.
7. Dinas Sosial Kota melalui Tim Verval menyelesaikan finalisasi daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.
  8. Hasil finalisasi daftar calon KPM yang lolos disampaikan oleh fungsi bidang pengelolaan data DTKS kepada Direktorat Jenderal yang menangani pelaksanaan program BPNT.
  9. Penetapan data KPM berupa nama, alamat, dan identitas lainnya oleh Direktorat Jenderal.
  10. Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mengelola pelaksanaan program BPNT diserahkan ke Dinas Sosial Kota. Kemudian Dinas Sosial memberikan kepada Tim Verval kelurahan.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.

### **3.2 Subjek Penelitian**

Subyek penelitian ini sering disebut sebagai informan. Informan itu sendiri adalah orang-orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan keadaan yang berkaitan dengan latar belakang

penyelidikan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah yaitu perangkat kelurahan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan RT di Kelurahan Sicincin. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengambil sampel adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu cara penentuan subjek penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang tepat untuk fokus penelitian.

Kriteria-kriteria tersebut, yaitu:

- a. Subjek yang memiliki wewenang dan mengetahui serta memahami program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- b. Subjek memiliki dan mengetahui data serta terlibat langsung dalam fenomena penelitian yang sedang peneliti lakukan.
- c. Subjek memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi.
- d. Subyek yang dimintai keterangan tidak sedang sakit atau memiliki masalah kesehatan lainnya.

Maka didapatkan jumlah subjek dalam penelitian dari kriteria tersebut sebanyak 4 orang yaitu terdiri dari 3 informan (Kepala Kelurahan, Kasi Kesos dan Ekbang, dan Ketua RT 002) dan 1 *key* informannya yaitu Ketua PSM sekaligus Tim Verval. Adapun subjek penelitian yang telah dipilih adalah :

- a. *Key* informan (Ketua PSM sekaligus Ketua Tim Verval) Adapun *key* informan yang peneliti pilih tersebut adalah A.A.
- b. Informan  
Adapun informan yang memenuhi kriteria sebagai informan yang telah peneliti pilih :
  1. Ketua RT yaitu A.H.
  2. Kasi Kesos dan Ekbang yaitu A.N.
  3. Ketua RT 002 yaitu D.I.

### 3.3 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber dalam data primer adalah Kepala Kelurahan, Kasi Kesos dan Ekbang, Ketua RT 002, dan Ketua PSM sekaligus Tim Verval. Selain itu data primer juga didapat melalui pengamatan secara langsung atau observasi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa buku, jurnal, website resmi, penelitian sebelumnya dan laporan kegiatan tim verval. Selain itu, juga mengambil data dari arsip dan foto sebagai bukti sah dalam melakukan penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2018). Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian dengan cara bertanya dan menjawab, tatap muka antara penulis dan responden. Hasil dari jawaban tersebut telah direkam peneliti melalui alat bantu perekam. Metode wawancara semi terstruktur dilakukan peneliti untuk menyiapkan beberapa poin-poin penting dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Kelurahan, Kasi Kesos dan Ekbang, Ketua RT 002, dan Ketua PSM sekaligus Tim Verval.

#### 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan pemahaman. Pengamatan langsung atau pengumpulan data langsung adalah suatu metode dalam mengumpulkan sebuah data menggunakan mata tanpa bantuan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengamatan secara langsung proses pemberian Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) terhadap warga masyarakat di Kelurahan Sicincin.
- b. Pengamatan secara langsung keadaan yang ada di Kelurahan Sicincin.

#### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data kunci di kelurahan Sicincin sebagai panduan penelitian dan data pendukung. Melalui teknik komunikasi, peneliti memperoleh informasi dari informan sebagai narasumber, maupun dari berbagai sumber tertulis seperti laporan kegiatan tim verval atau dokumen yang dapat diakses oleh informan berupa website dan foto.

### 3.5 Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu (Moleong, 2018):

- a. Pengelompokan (mengklasifikasikan) data yang sejenis untuk memudahkan analisis bagi peneliti. Memberikan gambaran tentang informasi yang diterima.
- b. Menafsirkan data menggunakan teori-teori yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka.
- c. Hasil umum dari data yang dianalisis menunjukkan hasil.

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### Gambaran Umum Kelurahan Sicincin

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Timur dengan penelitian yang berjudul “Mekanisme Penetapan Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat” pada tahun 2022.

Kelurahan Sicincin adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatra Barat. Dahulu Kelurahan Sicincin merupakan 2 kelurahan yang terpisah yaitu Kelurahan Sicincin Hilir dan Kelurahan Sicincin Mudik. Pada tahun 2014 berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2014 Kelurahan resmi digabung menjadi satu kelurahan yaitu Kelurahan Sicincin. Tujuan digabungnya Kelurahan Sicincin adalah agar mempermudah masyarakat dalam sistem administrasi dan agar mempermudah pemerintahan karena wilayahnya yang kecil.

Kelurahan Sicincin terdiri dari 5 RW dan 10 RT. Penduduknya berjumlah 3.170 jiwa terdiri dari 1.606 jiwa laki-laki dan 1.564 jiwa perempuan.

### Pertumbuhan Penduduk

Tabel. 4.1

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Sicincin 2020-2022

No	Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	2020	1.472	1.501	2.973
2.	2021	1.570	1.495	3.065
3.	2022	1.606	1.564	3.170

Sumber: Kantor Kelurahan Sicincin 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sicincin mengalami

peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk di Kelurahan Sicincin karena adanya pembangunan perumahan di beberapa titik di Kelurahan tersebut. Berawal dari tahun 2020 dimana jumlah penduduk sebanyak 2.973 jiwa, lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.065 jiwa. Tahun 2022 jumlah penduduk meningkat kembali menjadi 3.170 jiwa. Ini membuktikan bahwasanya penduduk Kelurahan Sicincin sangat cepat mengalami pertumbuhan penduduk. Faktor peningkatan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, perpindahan penduduk, dan kematian. Namun faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk di Kelurahan Sicincin adalah perpindahan penduduk (migrasi) dari luar ke dalam Kelurahan Sicincin.

### Kemiskinan

Tabel 4.8

Data Masyarakat Miskin di Kelurahan Sicincin tahun 2019-2022

NO	Tahun	Jumlah Masyarakat Miskin/Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2019	149	2.663
2	2020	144	2.973
3	2021	133	3.065
4	2022	128	3.170

Sumber: Kantor Kelurahan Sicincin 2022

Jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Sicincin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut sesuai dengan data pada tabel di atas ini. Pada tahun 2019 jumlah masyarakat miskin adalah 149 KK dengan jumlah penduduk 2.663 jiwa, kemudian pada tahun 2020 berjumlah 144 KK dengan jumlah penduduk 2.973 jiwa, lalu pada tahun 2021 jumlah masyarakat miskin adalah 133 KK dengan jumlah penduduk 3.065 jiwa dan di tahun 2022 berjumlah 128 KK dengan jumlah penduduk 3.170 jiwa.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Mekanisme Penetapan Masyarakat Penerima BPNT di Kelurahan Sicincin

#### a. Pendataan Kartu Keluarga Miskin

Pendataan data masyarakat adalah kegiatan pengumpulan fakta dan evaluasi kinerja yang sistematis berdasarkan upaya pemerintah berdasarkan kriteria masyarakat miskin dan mekanisme untuk mencatat keadaan dan kondisi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk pendataan penduduk miskin disetujui oleh Kementerian Sosial. Masyarakat harus terdata sebagai penduduk di Kelurahan Sicincin yang dibuktikan oleh KTP atau minimal memiliki Kartu Keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dijelaskan bahwa pendataan Kartu Keluarga (KK) miskin dilakukan dari lingkup yang paling kecil dahulu yaitu pendataan oleh RT setempat, lalu hasil pendataan tersebut diserahkan ke PSM selaku pekerja sosial, PSM akan turun lapangan untuk mensurvei masyarakat miskin tersebut. Lalu data-data yang telah disurvei dimasukan ke SIMDUK.

#### b. Prioritas Kepala Keluarga (KK) Penerima BPNT

Penerima BPNT adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di wilayah permohonan, yang namanya masuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan diperoleh hasil bahwa Prioritas Kartu Keluarga (KK) penerima BPNT adalah masyarakat miskin yang terdata di DTKS, tidak mampu memenuhi kebutuhan sadang, pangan dan papan, mempunyai anggota keluarga yang telah lansia, ODGJ, dan disabilitas.

### c. Penetapan Kepala Keluarga (KK) Penerima BPNT

Kartu Keluarga (KK) penerima BPNT ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS) . Berdasarkan data DTKS tersebut, Kementerian Sosial RI menetapkan siapa saja yang termasuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan dijelaskan bahwa penetapan Kepala Keluarga (KK) penerima BPNT berdasarkan pada data yang diberikan oleh RT. Data tersebut merupakan hasil pendataan masyarakat miskin yang layak mendapatkan BPNT. Selanjutnya Tim Verval akan turun lapangan untuk mensurvei kelayakan masyarakat tersebut. Syaratnya masyarakat tersebut harus terdata pada DTKS. Dalam menilai kelayakan calon penerima BPNT dilakukan sebuah wawancara ringan mengenai kehidupan sehari-hari sambil melihat keadaan rumah calon penerima BPNT tersebut Setelah mensurvei, data yang diperoleh diserahkan kepada Dinas Sosial. Data tersebut diinput langsung oleh Dinas Sosial ke aplikasi SIKS-NG. Kemudian Kementerian Sosial yang akan menetapkan nama-nama penerima BPNT. Untuk Kelurahan Sicincin mendapat jatah 76 KK penerima BPNT.

### 2. Faktor Penghambat dan Penunjang Penetapan BPNT

#### a. Faktor Penghambat Penetapan BPNT

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, di ketahui bahwa hambatan dalam penetapan BPNT adalah menentukan penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan pusat yang menentukan nama-nama yang keluar siapa saja lalu data yang dimiliki melebihi dari permintaan jumlah penerima bantuan, dalam menentukan siapa yang pantas atau diprioritaskan menerima bantuan

sedangkan kehidupan para calon penerima bantuan sama saja antara yang satu dengan yang lainnya, dan kemudian nama yang diajukan ada yang belum keluar.

#### **b. Faktor Penunjang / pendukung Penetapan BPNT**

Mengenai mekanisme penetapan penerima BPNT di desa Sicincin, selain kendala tentunya ada penunjang atau pendukungnya, agar program tetap dapat berfungsi dan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dijelaskan bahwa faktor penunjang dalam menetapkan BPNT adalah orang pusat sebagai pihak yang menetapkan penerima bantuan merupakan hal yang semestinya karena itu adil. Sebab jika yang menentukan dari pihak kelurahan, RT, RW, atau PSM itu ditakutkan akan terjadi kecurangan dalam menentukan penerima bantuan karena alasan keluarga ataupun ada hubungan dekat, kemudian dengan adanya kemajuan zaman. Maka mempermudah mengakses apa saja termasuk masyarakat yang terdata di DTKS. Hal itu mempermudah tim untuk mensurvei calon penerima bantuan. Lalu pemberian bantuan dari pemerintah telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun tidak banyak. Masyarakat juga antusias mendapatkan bantuan tersebut sehingga mengantarkan KK mereka ke rumah RT. Hal tersebut juga telah membantu mempermudah RT untuk mendata masyarakat tersebut tanpa harus data satu-satu ke rumah masyarakat. Berdasarkan pernyataan key informan dijelaskan bahwa Dinas Sosial telah memberikan SOP penerima bantuan BPNT agar yang mendapatkan bantuan adalah orang yang telah tepat sasaran. Sehingga Tim melakukan tugas sesuai dengan SOP yang telah diberikan.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Proses identifikasi penerima manfaat BPNT dimulai dengan

mengumpulkan informasi tentang kepala rumah tangga miskin (KK). Selain itu, data masyarakat menunjukkan bahwa penerima manfaat yang disukai BPNT adalah keluarga dengan status sosial ekonomi terendah, kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang tinggal di kawasan 3T.

2. Dalam pelaksanaan program BPNT juga terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor penunjang/pendukung penetapan penerima BPNT :

- a. Faktor penghambat atau kendala dalam penerimaan bantuan seperti data yang dimiliki melebihi jumlah permintaan penerima bantuan, nama yang dimasukan belum keluar, dan kendala lainnya adalah menentukan yang pantas menerima bantuan dilihat dari kehidupannya sedangkan semuanya hidup merata.
- b. Faktor penunjang/pendukung penetapan penerima BPNT adalah penetapan penerima bantuan yang ditentukan dari pusat dengan memberikan SOP telah membuat penerima bantuan tepat pada sarasannya, Sebab jika yang menentukan dari pihak kelurahan, RT, RW, atau PSM itu ditakutkan akan terjadi kecurangan dalam menentukan penerima bantuan karena alasan keluarga ataupun ada hubungan dekat. Faktor penunjang lainnya adalah dengan adanya kemajuan zaman, maka telah mempermudah Tim mengakses DTKS. Hal itu mempermudah tim untuk mensurvei calon penerima bantuan. Proses pemberian bantuan dari kantor pos telah

mempermudah pemerintah menyalurkan bantuan.

#### Saran

1. Peneliti berharap mekanisme pemberian bantuan tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala-kendala yang serius dan dijalankan dengan baik sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial RI.
2. Diharapkan lebih banyak peneliti yang dapat meneliti lebih dalam tentang praktik masyarakat penerima BPNT dan mewawancarai lebih banyak informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

Moleong, M. P. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Purwanto, Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

TimVisi Yustisia, (2014). *UUD Negara Republik Indonesia 1945*, Visimedia, Jakarta

Utama, R. T. (2008). *UUD 45 dan Amandemen I-IV*. Jakarta: CV Tamita Utama.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, M. D., & Rusfiana, M. D. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

BPNT, T. P. (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* . Jakarta.

Hamid, I., Astuty, S., & Samsir, A. (2020). Efektivitas Pengelolaan Program Rastra (Beras Sejahtera) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Corawali Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Herwanto. (2022, Februari 21). *Bantuan Program Sembako (BPNT) 2022 Cair, Pos Indonesia Salurkan Rp 600 ribu untuk 18,8 Juta KPM*. Retrieved Mei 18, 2022, from Kompas TV: <https://www.kompas.tv/article/263500/bantuan-program-sembako-bpnt-2022-cair-pos-indonesia-salurkan-rp-600-ribu-untuk-18-8-juta-kpm>

Hunt, Chester L, Ram, A., & Sinaga, H. (1984). *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.